

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 144/ORT.04-Kpt/6408/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUTAI TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, perlu melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten dengan membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi yang handal;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
- c. Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021
2. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor : 143/ORT.04-BA/6408/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BORIKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-

undangan;

6. Tim Penguatan Kelembagaan;

7. Tim Penguatan Tata Laksana;

8. Tim Penataan Manajemen Aparatur Sipil
Negara;

9. Tim Penguatan Pengawasan

10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan

11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

ULFA JAMILATUL FARIDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kasubbag Hukum.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 144/ORT.04-Kpt/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Ulfa Jamilatul Farida	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	-
2.	Sayuti Ibrahim	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
3.	Muhammad Indra	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
4.	Hasan Basri	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar
5.	Handoko	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.

TIM PELAKSANA						
6.	Sudirman	Sekretaris KPU Kabupaten Kutai Timur	KETUA	-	-	Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; Merancang rencana aksi program reformasi Biro-rasi Satuan Kerja; Melaksanakan Reformasi Bikrasi bersama Satuan Kerja terkait;
7.	Saifuddin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	-	-	Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
8.	Listiana Astar	Kepala Subbagian Hukum	Sekretaris	-	-	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian- penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun
9.	Azis Ali Achmadi	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Anggota	-	-	Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;
10.	Luluk Chaerun Nikmah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	-	-	Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serit melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan
TIM AGEN PERUBAHAN						
11.	Luluk Chaerun Nikmah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	-	-	Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan prilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
12.	Listiana Astar	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator Agen Perubahan Pada Subbagian Hukum	-	-	
13.	Azis Ali Achmadi	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	-	-	
14.	Saifuddin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	-	-	

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN					
15.	Saifuddin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	-	Menyusun Strategi manajemen Perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur; dan
16.	Agus	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	-	Melaksanakan sosialisasi dan Internalisasi manajemn perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
17.	Tahmi	Penelaah Pengelolaan Keuangan	Anggota		
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
18.	Listiana Astar	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	-	Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur; dan
19.	Maesuri Sennang	Pengolah Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota	-	Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN					
20.	Saifuddin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	-	Membentuk Unit Kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Satuan Kerja.
21.	Agus	Penyusunan Laporan Keuangan	Anggota		
22.	Suyeni	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota		

IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA

23.	Luluk Chaerun Nikmah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	-	Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>cure business</i> Satuan Kerja; dan Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
24.	Saleh Pandurata A	Pramu Pustaka	Anggota	-	
25.	Achmad Afdalul Khiyar Amri	Tenaga Pendukung	Anggota	-	

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN

26.	Saifuddin	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	-	Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di satuan kerja;
27.	Agus	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	-	Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
28.	Tahmi	Penelaah Pengelolaan Keuangan	Anggota	-	Membangun sistem dan proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengolahan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja
29.	Ahmad Koyum Adi	Pengadministrasian Umum	Anggota	-	
30.	Mulyanti Sari	Pramu Acara	Anggota	-	

VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

31.	Listiana Astar	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	-	Melaksanakan peenrapan sistem Pengendalian ltern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
32.	Suriyani	Administrasi	Anggota	-	Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA					
33.	Luluk Chaerun Nikmah	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	-	Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur disatuan kerja; dan Menyusun Indikator Kinerja (IKU) KPU Kabupaten Kutai Timur
34.	Saleh Pandurata A	Pramu Pustaka	Anggota	-	
35.	Achmad Afdalul Khiyar Amri	Tenaga Pendukung	Anggota	-	
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
36.	Azis Ali Achmadi	Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	-	Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja
37.	Suyeni	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota		
38.	Maesuri Sennang	Pengolah Evaluasi dan Dokumentasi	Anggota		
39.	Mulyanti Sari	Penyusunan Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota		

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Kasubbag Hukum,



Ditetapkan di
pada tanggal

Sangatta
14/03/2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

ULFA JAMILATUL FARIDA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR
 NOMOR : 144/ORT.04-Kpt/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2022

RENCANA AKSI KINERJA

Nama Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kabupaten Kutai Timur
 Tahun Anggaran : 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA	KETERANGAN	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN																			
1. Pelaksanaan Perencanaan dan Organisasi																			
1	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	1 Kegiatan	Koordinasi dan kerjasama dengan instansi Terkait dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024														Sub Bag Program dan Data	
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Kutai Timur yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	10 Kali	Merivisi Anggaran sesuai dengan Peraturan														Sub Bag Program dan Data	
3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	Pengelolaan laporan melalui Aplikasi E Monev dan SMART tepat waktu														Sub Bag Program dan Data	
		Persentase KPU Kabupaten Kutai Timur yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022 dan penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022														Sub Bag Program dan Data	

1. Project Title: [Blank]
 2. Project Number: [Blank]
 3. Project Manager: [Blank]
 4. Project Start Date: [Blank]
 5. Project End Date: [Blank]

Activity ID	Activity Name	Activity Duration (Days)											Activity Type	Activity Status			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12		
1	Project Initiation															Task	Completed
2	Requirements Gathering															Task	In Progress
3	System Design															Task	Not Started
4	Development															Task	Not Started
5	Testing															Task	Not Started
6	Deployment															Task	Not Started
7	Project Closure															Task	Not Started

Activity 1: Project Initiation
 Activity 2: Requirements Gathering
 Activity 3: System Design
 Activity 4: Development
 Activity 5: Testing
 Activity 6: Deployment
 Activity 7: Project Closure

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA	KETERANGAN	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
II. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian																			
1	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97.5%	Pengusulan Kenaikan Pangkat														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	Melaksanakan Apel Pagi setiap Hari Senin dan Rapat secara berkala														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
2	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	90%	Pengusulan Pegawai Pemerintah Non PNS														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
3	Tersedianya data dan informasi Kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	80%	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian.														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
III. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara																			
1	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	Pengelolaan Laporan Keuangan														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
2	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan	Pengelolaan Laporan Keuangan														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
3	Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	85%	Pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA	KETERANGAN	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
4	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kabupaten Kutai Timur yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	Pengelolaan Laporan Keuangan														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
5	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Kutai Timur yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	Pengelolaan Barang Milik Negara														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Laporan	Pengelolaan SIMAK BMN														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
IV. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor																			
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten Kutai Timur dalam Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,50%	Penataan dan Pengelolaan Arsip														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Kabupaten Kutai Timur	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	Pemeliharaan dan Perawatan sarana transportasi														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	70%	Pemeliharaan dan Perawatan Fasilitas Perkantoran														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Kutai Timur yang berfungsi dengan baik	72%	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung dan Gudang														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA	KETERANGAN	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	Membuat Jadwal Rapat														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	Menindaklanjuti Hasil Rapat Pleno														semua Sub Bag	
4	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Timur	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Kutai Timur yang dapat ditanggulangi	100%	Petugas Keamanan melaksanakan Tugas dengan Baik														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
V. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal																			
1	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	Menindaklanjuti Rekomendasi dari Tim Pemeriksa														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Kutai Timur	Persentase KPU Kabupaten Kutai Timur yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	70%	Monitoring dan Evaluasi Kinerja														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
VI. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan																			
1	Peningkatan kompetensi SDM KPU Kabupaten Kutai Timur	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	Mendata Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat.														Sub Bag Keuangan, Umum dan Logistik	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI																			
I. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan																			
1	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	Mengelola Produk Hukum														Sub Bag Hukum	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA	KETERANGAN	
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase Informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	93%	Menyajikan Informasi Produk Hukum														Sub Bag Hukum	
II. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW																			
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Kutai Timur dalam memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	Koordinasi dengan instansi Terkait untuk Memutakhirkan Dapil Pemilu Tahun 2024														Sub Bag Teknis dan Hupmas	
2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	Menyiapkan Berkas PAW untuk diverifikasi dan membuat Surat serta BA														Sub Bag Teknis dan Hupmas	
3	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	80%	Pengelolaan SK Kepengurusan Parpol														Sub Bag Hukum	
III. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat																			
1	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten Kutai Timur telah memiliki pusat "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	95%	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu														Sub Bag Teknis dan Hupmas	
2	Meningkatnya kualitas layanan informasi data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Melayani Permohonan Informasi melalui PPID														Sub Bag Teknis dan Hupmas	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN	RENCANA PELAKSANAAN												PELAKSANA	KETERANGAN		
					B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
IV. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi																				
1	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e government KPU	Persentase KPU Kabupaten Kutai Timur dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	Melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan melalui SIDALIH															Sub Bag Program dan Data	
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	Menyediakan Website untuk sarana penyampaian informasi																Sub Bag Program dan Data
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur secara terintegrasi	65%	Penerapan SIDALIH																Sub Bag Program dan Data

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 14/03/2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

ULFA JAMILATUL FARIDA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Kasubbag Hukum.

Abteilung	Mitarbeiter	Produktionsleistung (Stückzahl)				Produktionszeit (h)	Produktionskosten (€)	Produktionswert (€)
		Q1	Q2	Q3	Q4			
Produktion A	Mitarbeiter 1	100	120	110	130	10	1000	1200
	Mitarbeiter 2	110	130	120	140	11	1100	1300
Produktion B	Mitarbeiter 3	120	140	130	150	12	1200	1400
	Mitarbeiter 4	130	150	140	160	13	1300	1500
Gesamt		460	540	500	580	46	4600	5400

Produktionsleistung in der Periode
 (Stückzahl) (h) (€)

Produktionswert in der Periode
 (€) (h) (Stückzahl)

[Handwritten signature]